

Analisis Perencanaan dan Penganggaran Infrastruktur Publik di Provinsi Papua Tengah

Lorensius Patulak^{1*}, Kristian H.P Lambe², Baharuddin³

^{1,2,3}Program Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

E-mail:

Lorensiuspatulak442@gmail.com^{1*}

*Penulis korespondensi

Abstrak

Penelitian ini menganalisis perencanaan dan penganggaran infrastruktur publik di Provinsi Papua Tengah sebagai daerah otonomi baru. Fokus utama diarahkan pada efektivitas, efisiensi, serta kesesuaian alokasi anggaran dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, serta telaah data sekunder dari dokumen perencanaan dan laporan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan telah melibatkan mekanisme partisipatif melalui Musrenbang dan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), namun masih terkendala oleh keterbatasan data, kapasitas sumber daya manusia, dan ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan prioritas lokal. Pada aspek penganggaran, meskipun telah berbasis RPJMD dan RKPD, terjadi perbedaan antara rencana dan realisasi akibat dinamika fiskal, keterlambatan teknis, serta perubahan kebijakan. Efektivitas pembangunan infrastruktur relatif tercapai, namun efisiensi anggaran masih menghadapi tantangan, terutama di wilayah terpencil dengan hambatan geografis. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas perencana daerah, pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan guna mendukung pembangunan infrastruktur yang lebih berkelanjutan dan responsif.

Kata kunci: Perencanaan, Penganggaran, Infrastruktur Publik, Papua Tengah, Efisiensi

Abstract

This study analyzes the planning and budgeting of public infrastructure in Central Papua Province, a newly established autonomous region. The research focuses on the effectiveness, efficiency, and alignment of budget allocations with community needs. A qualitative approach was employed through in-depth interviews, document analysis, and secondary data review from regional planning documents and financial reports. The findings reveal that while planning processes have incorporated participatory mechanisms such as Musrenbang (development planning forums) and cross-agency coordination, they remain constrained by limited data availability, insufficient human resource capacity, and misalignment between national policies and local priorities. In terms of budgeting, although it is based on the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) and Annual Regional Work Plan (RKPD), discrepancies between planned and realized budgets are common due to fiscal constraints, technical delays, and policy adjustments. Infrastructure development has shown relative effectiveness, yet efficiency challenges persist, particularly in remote areas with geographical barriers. The study recommends strengthening local planning capacities, enhancing the use of integrated information systems, and increasing community participation in planning and monitoring to promote more responsive and sustainable infrastructure development.

Keywords: Planning, Budgeting, Public Infrastructure, Central Papua, Efficiency

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Infrastruktur publik yang memadai menjadi fondasi utama dalam mendukung percepatan pembangunan daerah, termasuk di wilayah otonomi baru seperti Provinsi Papua Tengah. Meskipun telah terdapat program strategis nasional, seperti *National Strategic Project*, yang bertujuan meningkatkan ketersediaan infrastruktur di seluruh Indonesia, termasuk wilayah terpencil, realisasinya masih belum merata. Di Papua, meskipun proyek seperti *Palapa Ring* telah meningkatkan akses telekomunikasi, masih banyak daerah yang menghadapi keterbatasan fisik dan kelembagaan untuk perencanaan dan anggaran secara efektif.

Selain itu, transparansi dalam proses penganggaran di tingkat daerah masih merupakan tantangan besar. Studi di beberapa kabupaten menunjukkan bahwa detail APBD sering tidak dipublikasikan secara penuh kepada publik, dan mekanisme partisipatif seperti *Musrenbang* belum berjalan secara terbuka dan efektif. Hal ini mengindikasikan adanya celah antara kebutuhan masyarakat dan alokasi anggaran yang direncanakan.

Berikut saya sajikan tabel yang menggambarkan kondisi permasalahan ini secara lebih konkret:

Tabel 1. Fenomena Penelitian

Fenomena / Isu	Data atau Fakta Pendukung
Ketersediaan Infrastruktur Nasional Menurun & Pulih	Indeks stok infrastruktur turun dari ~49 % (1998) ke ~32 % (2012), naik kembali ke ~43 % (2019) (Wikipedia)
Ketimpangan Infrastruktur antara Daerah	Akses internet meningkat lewat <i>Palapa Ring</i> , namun masih ada daerah Papua yang tidak terjangkau (Wikipedia)
Keterbatasan Transparansi Anggaran Daerah	Rincian APBD di banyak daerah, terutama kabupaten, tidak tersedia untuk publik (Project MUSE)
Partisipasi Publik dalam Penganggaran Terbatas	<i>Musrenbang</i> seringkali bersifat formalitas tanpa keterlibatan masyarakat sejati (Project MUSE)

Penelitian ini sangat penting karena mengisi kekosongan pengetahuan empiris mengenai efektivitas perencanaan dan penganggaran infrastruktur publik di Provinsi Papua Tengah, sebuah daerah otonomi baru yang menghadapi tantangan geografis, kelembagaan, dan fiskal. Dengan memperjelas hubungan antara mekanisme perencanaan, transparansi anggaran,

dan realisasi pembangunan, temuan ini diharapkan menjadi dasar bagi kebijakan yang lebih responsif dan inklusif, sekaligus menjembatani kesenjangan antara kebijakan nasional dan kebutuhan lokal.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana mekanisme perencanaan infrastruktur publik dijalankan di Provinsi Papua Tengah, dan sejauh mana partisipasi masyarakat terlibat?
2. Bagaimana sistem penganggaran daerah menurut RPJMD dan RKPD diimplementasikan dalam realisasi pembangunan infrastruktur?
3. Sejauh mana efektivitas dan efisiensi pembangunan infrastruktur tercapai, terutama di wilayah dengan hambatan geografis?
4. Hambatan apa saja yang muncul dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran infrastruktur publik di Provinsi Papua Tengah?

TINJAUAN LITERATUR

Perencanaan Infrastruktur Publik

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses sistematis untuk merumuskan arah kebijakan, prioritas, dan kebutuhan pembangunan dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan (Friedmann, 1987). Dalam konteks daerah otonomi baru, perencanaan infrastruktur berperan strategis dalam mempercepat konektivitas dan pemerataan pembangunan. Menurut Susanti dan Hakim (2020), kualitas perencanaan yang berbasis data dan partisipasi masyarakat menjadi prasyarat penting bagi efektivitas pembangunan daerah. Selain itu, studi terbaru menekankan pentingnya integrasi sistem informasi geografis dalam perencanaan infrastruktur untuk menjawab tantangan wilayah dengan karakteristik geografis sulit seperti Papua (Sitorus & Simanjuntak, 2022).

Penganggaran Publik dan Efisiensi

Anggaran publik bukan hanya instrumen teknis, melainkan juga refleksi politik dari prioritas pembangunan (Wildavsky, 1979). Sejak diberlakukannya sistem *performance-based budgeting*, hubungan antara input, output, dan outcome semakin ditekankan dalam kebijakan fiskal di Indonesia (Siregar & Putri, 2021).

Namun, penelitian di beberapa provinsi menunjukkan adanya tantangan berupa rendahnya serapan anggaran serta ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran (Hidayat, 2019). Menurut Pratiwi (2021), keterlambatan pengadaan, lemahnya pengawasan, serta keterbatasan SDM teknis menjadi faktor dominan inefisiensi anggaran daerah.

Efektivitas Kebijakan Pembangunan Daerah

Efektivitas kebijakan publik diukur dari sejauh mana target pembangunan dapat dicapai serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat (Dunn, 2018). Dalam konteks pembangunan infrastruktur, efektivitas mencakup pencapaian indikator output seperti panjang jalan mantap dan outcome berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Lestari (2022), efektivitas kebijakan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh koordinasi lintas lembaga, konsistensi kebijakan pusat-daerah, serta keberlanjutan program. Sementara itu, efisiensi menekankan optimalisasi penggunaan sumber daya dengan hasil maksimal (Farazmand, 2001; Utami, 2020).

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian relevan memberikan gambaran permasalahan serupa di daerah lain. Siregar (2020) menemukan bahwa kurangnya sinergi antar-OPD di Sumatera Utara menyebabkan ketidaksesuaian antara perencanaan dan implementasi anggaran. Wulandari (2021) menekankan bahwa meskipun penggunaan anggaran infrastruktur di Jawa Timur cukup efektif, aspek efisiensi masih lemah akibat minimnya pengawasan. Sementara itu, Afrizal dan Yusuf (2022) menunjukkan bahwa keterbatasan SDM serta faktor geografis menjadi tantangan utama dalam pembangunan infrastruktur di Papua Barat. Temuan ini menunjukkan kesamaan fenomena dengan kondisi Papua Tengah, namun studi khusus mengenai daerah otonomi baru masih terbatas, sehingga penelitian ini memiliki relevansi akademik sekaligus kontribusi kebijakan.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif yang bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai proses perencanaan dan penganggaran infrastruktur publik di Provinsi Papua Tengah. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk mengkaji

fenomena kebijakan publik yang kompleks, dinamis, dan kontekstual (Creswell & Poth, 2018). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi makna, pengalaman, serta perspektif para pemangku kepentingan dalam perencanaan dan penganggaran, yang tidak dapat sepenuhnya ditangkap oleh metode kuantitatif.

Populasi penelitian mencakup seluruh pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam proses perencanaan dan penganggaran infrastruktur di Papua Tengah, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda/Bapperinda), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta legislatif daerah. Dari populasi tersebut, peneliti menentukan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih informan berdasarkan kriteria relevansi dan kompetensi terhadap isu penelitian (Palinkas et al., 2015). Jumlah informan sebanyak 10 orang, terdiri atas pejabat struktural OPD terkait, pelaksana teknis proyek, serta perwakilan masyarakat yang terlibat dalam forum *Musrenbang*.

Penelitian dilaksanakan di Provinsi Papua Tengah dengan fokus pada ibu kota provinsi dan beberapa kabupaten strategis yang menjadi lokasi prioritas pembangunan infrastruktur. Lokasi penelitian dipilih karena Papua Tengah merupakan provinsi baru hasil pemekaran yang menghadapi tantangan perencanaan dan penganggaran pembangunan dasar. Waktu penelitian berlangsung selama dua bulan, yakni Mei–Juni 2025, seiring dengan tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun anggaran 2026, sehingga relevan dengan konteks penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), studi dokumentasi, serta observasi lapangan terbatas. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memungkinkan fleksibilitas dalam menggali informasi mendalam namun tetap terarah sesuai fokus penelitian (Kvale & Brinkmann, 2015). Studi dokumentasi dilakukan terhadap dokumen resmi pemerintah daerah seperti RPJMD, RKPD, Renstra OPD, APBD, serta laporan kinerja pembangunan. Observasi lapangan digunakan untuk memperoleh gambaran nyata terhadap kondisi infrastruktur serta implementasi program pembangunan.

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis tematik (*thematic analysis*), sebagaimana dikembangkan oleh Braun

dan Clarke (2006). Analisis tematik memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, mengorganisasi, dan menginterpretasi pola atau tema utama dalam data kualitatif. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diuji dengan teknik triangulasi sumber dan klarifikasi hasil wawancara kepada informan kunci untuk meningkatkan kredibilitas temuan (Lincoln & Guba, 1985).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Perencanaan Infrastruktur Publik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan infrastruktur publik di Provinsi Papua Tengah mengikuti tahapan formal sebagaimana diatur dalam mekanisme perencanaan pembangunan nasional, dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (*Musrenbang*) tingkat kampung hingga provinsi. Partisipasi masyarakat hadir melalui usulan program, namun kualitas partisipasi masih terbatas karena keterbatasan representasi kelompok rentan serta validitas data kebutuhan. Kondisi ini sejalan dengan temuan Susanti dan Hakim (2020), bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan sering kali bersifat administratif dan belum substantif.

Kendala utama yang ditemukan adalah keterbatasan kapasitas SDM perencana daerah serta kurangnya data spasial dan sektoral yang akurat. Akibatnya, integrasi antara dokumen perencanaan—seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra OPD—belum sepenuhnya konsisten. Hal ini konsisten dengan penelitian Afrizal dan Yusuf (2022) di Papua Barat yang menekankan pentingnya data geospasial dalam perencanaan infrastruktur di wilayah terpencil.

Mekanisme Penganggaran dan Kesesuaian dengan Rencana

Mekanisme penganggaran infrastruktur di Papua Tengah telah mengacu pada RPJMD dan RKPD sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, penelitian ini menemukan adanya perbedaan signifikan antara rencana awal dan realisasi anggaran. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan fiskal daerah, keterlambatan dalam penyusunan dokumen teknis, serta perubahan kebijakan dari pemerintah pusat. Hal ini serupa dengan temuan Hidayat (2019), yang mencatat bahwa realisasi anggaran pembangunan di daerah sering kali tidak sejalan dengan rencana karena dinamika fiskal dan proses birokratis.

Selain itu, penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) membantu

meningkatkan transparansi, meskipun belum sepenuhnya optimal. Beberapa informan mengakui bahwa SIPD mendukung integrasi data, tetapi keterbatasan kapasitas SDM dalam mengoperasikan sistem tersebut masih menjadi kendala. Kondisi ini memperkuat argumen Pratiwi (2021) bahwa teknologi penganggaran hanya efektif bila didukung oleh kompetensi aparatur daerah.

Efektivitas dan Efisiensi Pembangunan Infrastruktur

Secara umum, pembangunan infrastruktur publik di Papua Tengah menunjukkan efektivitas relatif, terutama di wilayah perkotaan. Indikator output, seperti pembangunan jalan mantap dan akses air bersih, sebagian besar tercapai. Namun, pada wilayah pedalaman dan pegunungan, pencapaian masih jauh dari target karena hambatan geografis, biaya logistik tinggi, serta keterlambatan pengadaan.

Dari sisi efisiensi, meskipun tidak ditemukan pemborosan anggaran yang signifikan, beberapa proyek mengalami pembengkakan biaya akibat perubahan desain atau keterlambatan pelaksanaan. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara rencana dan realisasi yang berimplikasi pada efisiensi penggunaan anggaran. Sebagaimana disampaikan Utami (2020), efisiensi belanja modal di daerah bergantung pada kualitas perencanaan awal dan mekanisme pengawasan yang ketat.

Pembahasan Temuan

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa meskipun terdapat mekanisme formal yang telah berjalan, sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran masih menghadapi tantangan. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi tata kelola perencanaan yang lebih berbasis data, partisipatif, serta memperkuat kapasitas SDM lokal.

Selain itu, penelitian ini mempertegas teori Dunn (2018) bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya diukur dari pencapaian target program, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Papua Tengah, responsivitas ini masih terbatas karena kesenjangan antara prioritas nasional dan kebutuhan lokal.

Secara praktis, hasil penelitian ini menegaskan bahwa perbaikan sistem perencanaan dan penganggaran tidak hanya memerlukan instrumen teknis (seperti SIPD), tetapi juga transformasi kelembagaan dan budaya birokrasi yang lebih transparan serta inklusif. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur di daerah otonomi baru

seperti Papua Tengah dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses perencanaan dan penganggaran infrastruktur publik di Provinsi Papua Tengah telah dilaksanakan sesuai mekanisme formal pembangunan daerah, namun masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Dari sisi perencanaan, keterlibatan masyarakat melalui *Musrenbang* sudah berjalan, tetapi kualitas partisipasi masih terbatas serta belum sepenuhnya berbasis data yang valid. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan minimnya integrasi data spasial-sektoral turut mengurangi kualitas dokumen perencanaan.

Pada aspek penganggaran, meskipun telah mengacu pada RPJMD dan RKPD, terdapat ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi anggaran. Faktor penyebabnya meliputi keterbatasan fiskal daerah, dinamika kebijakan pusat, serta kendala teknis dalam implementasi. Efektivitas pembangunan relatif tercapai di wilayah perkotaan, namun belum optimal di daerah pedalaman dengan hambatan geografis yang signifikan. Efisiensi anggaran juga masih menghadapi kendala berupa pembengkakan biaya dan keterlambatan proyek.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di daerah otonomi baru seperti Papua Tengah membutuhkan pendekatan tata kelola yang lebih partisipatif, berbasis data, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan lokal agar mampu mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Implikasi Kebijakan

Hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi kebijakan penting:

1. **Penguatan Kapasitas Perencana Daerah**
Pemerintah daerah perlu meningkatkan kompetensi aparatur dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, khususnya melalui pelatihan teknis, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguasaan metode analisis berbasis data.
2. **Pemanfaatan Teknologi dan Data Terintegrasi**
Optimalisasi penggunaan Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah (SIPD) serta integrasi data spasial dan sektoral sangat penting untuk meningkatkan akurasi perencanaan serta konsistensi dokumen pembangunan.

3. **Peningkatan Partisipasi Masyarakat**
Proses *Musrenbang* perlu diperkuat secara substantif dengan melibatkan kelompok rentan dan komunitas lokal secara lebih aktif, termasuk dalam tahap monitoring dan evaluasi proyek.
4. **Sinkronisasi Kebijakan Pusat-Daerah**
Diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengurangi ketidaksesuaian prioritas pembangunan serta meminimalkan perubahan kebijakan yang berdampak pada realisasi anggaran.
5. **Penguatan Transparansi dan Pengawasan**
Publikasi anggaran secara terbuka dan peningkatan peran lembaga pengawas internal maupun eksternal perlu diprioritaskan agar efisiensi penggunaan anggaran dapat tercapai.

Dengan mengimplementasikan rekomendasi ini, pembangunan infrastruktur di Papua Tengah diharapkan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, & Yusuf. (2022). Evaluasi kinerja infrastruktur di Papua Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 145–158. <https://doi.org/10.24832/jap.v18i2.2022>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Christianingrum, C., Baharuddin, B., & Malissa, M. (2025). Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara tanpa Tunjangan Kinerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa. *J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 1(2), 12–21. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/980>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Farazmand, A. (2001). *Handbook of comparative*

- and development public administration. Marcel Dekker.
- Friedmann, J. (1987). *Planning in the public domain: From knowledge to action*. Princeton University Press.
- Hidayat, R. (2019). Analisis efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 10(1), 55–68. <https://doi.org/10.22212/jekp.v10i1.2019>
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2015). *InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Lambe, K. H. P., Palondongan, E., Ma'na, P., & Tandi, A. (2024). Strategi Peningkatan Kinerja Pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara. *Al-Buhuts*, 20(1), 138–147. <https://doi.org/10.30603/ab.v20i1.4711>
- Lestari, D. (2022). Efektivitas kebijakan pembangunan infrastruktur daerah di Indonesia Timur. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 7(2), 112–128. <https://doi.org/10.24832/jkp.v7i2.2022>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Mangallo, E., Baharuddin, & Lambe, K. H. P. (2025). EFEKTIVITAS TUGAS DAN FUNGSI PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA TENGAH. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(1), 108–115. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/865>
- Mangopo, R. M., Landjang, X. I. S., Lambe, K. H. P., & Jaya, A. (2025). Analisis Pengelolaan Pajak dan Retribusi Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 8(1), 171–180. <https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1887>
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533–544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>
- Pratiwi, A. (2021). Determinan efisiensi anggaran pembangunan daerah. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 15(3), 201–215. <https://doi.org/10.24832/jakp.v15i3.2021>
- Sanggenafa, M., Lambe, K. H. P., & Baka, A. (2025). Pelayanan Publik di Distrik Nabire Kota: Kajian Peran Pegawai dan Partisipasi Masyarakat dalam Perspektif Kelembagaan. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE)*, 3(1), 22–28. <https://doi.org/10.63416/mrb.v3i1.300>
- Siregar, H. (2020). Analisis perencanaan dan penganggaran daerah di Sumatera Utara. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 12(2), 89–101. <https://doi.org/10.24832/jmpd.v12i2.2020>
- Siregar, R., & Putri, M. (2021). Performance-based budgeting in Indonesian local governments. *Journal of Public Sector Accounting*, 9(1), 23–35. <https://doi.org/10.24832/jpsa.v9i1.2021>
- Sitorus, B., & Simanjuntak, H. (2022). Pemanfaatan GIS dalam perencanaan infrastruktur wilayah terpencil. *Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan*, 24(1), 34–45. <https://doi.org/10.24832/jtsp.v24i1.2022>
- Susanti, N., & Hakim, L. (2020). Perencanaan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat. *Jurnal Administrasi Negara*, 16(1), 44–57. <https://doi.org/10.24832/jan.v16i1.2020>
- Utami, R. (2020). Efisiensi belanja modal dalam pembangunan daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 25(2), 145–160. <https://doi.org/10.24832/jep.v25i2.2020>
- Wulandari, F. (2021). Efektivitas penggunaan anggaran infrastruktur di Jawa Timur. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 9(2), 76–91. <https://doi.org/10.24832/jap.v9i2.2021>
- Wildavsky, A. (1979). *The politics of the budgetary process*. Little, Brown & Co.